

Received: 27 Januari 2025 | Accepted: 06 Maret 2025 | Published: 06 Maret 2025

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bahitom

Rosa Linda¹, Andi Nurlela²

¹Universitas Terbuka

²Universitas Hasanuddin

Email: irosa7185@gmail.com¹, andinurlela@unhas.ac.id²



Abstract

This study aims to analyze knowledge sharing patterns in collaborative research networks in higher education institutions, focusing on sociological aspects and power dynamics within the academic community. The research method used is qualitative with a systematic literature review approach, analyzing scientific articles published between 2019-2024. The analysis shows three main findings: First, there has been a significant transformation in communication patterns towards a more horizontal model, facilitated by digital platforms and changes in academic hierarchies. Second, social capital plays a significant role in the effectiveness of knowledge sharing, with strong networks and trusting relationships contributing to better research collaboration. Third, institutional factors greatly influence collaboration dynamics, including organizational policies, digital infrastructure, and resource allocation. The results of this study show that although digital transformation has democratized research collaboration, social and institutional factors continue to shape knowledge sharing practices. This study identifies gaps in existing collaboration frameworks and recommends the development of an integrated approach that encompasses technological, social, and institutional dimensions. This approach aims to foster more inclusive and productive research networks in higher education. The findings contribute to the understanding of the complex interactions between digital transformation, social dynamics, and institutional structures in academic collaboration. This study also suggests practical implications for higher education institutions seeking to enhance their collaborative research capabilities and provides directions for further research in this evolving area.

Keywords: Direct Cash Assistance (BLT), Village, Effectiveness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola berbagi pengetahuan dalam jaringan penelitian kolaboratif di institusi pendidikan tinggi, dengan fokus pada aspek sosiologis dan dinamika kekuasaan dalam komunitas akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka sistematis, menganalisis artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan antara 2019-2024. Analisis menunjukkan tiga temuan utama: Pertama, terjadi transformasi signifikan dalam pola komunikasi menuju model yang lebih horizontal, yang difasilitasi oleh platform digital dan

perubahan hierarki akademik. Kedua, modal sosial memainkan peran penting dalam efektivitas berbagi pengetahuan, dengan jaringan yang kuat dan hubungan saling percaya berkontribusi pada kolaborasi penelitian yang lebih baik. Ketiga, faktor institusional sangat mempengaruhi dinamika kolaborasi, termasuk kebijakan organisasi, infrastruktur digital, dan alokasi sumber daya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital telah mendemokratisasi kolaborasi penelitian, faktor sosial dan institusional tetap membentuk praktik berbagi pengetahuan. Studi ini mengidentifikasi kesenjangan dalam kerangka kolaborasi yang ada dan merekomendasikan pengembangan pendekatan terintegrasi yang mencakup dimensi teknologi, sosial, dan institusional. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong jaringan penelitian yang lebih inklusif dan produktif di pendidikan tinggi. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang interaksi kompleks antara transformasi digital, dinamika sosial, dan struktur institusional dalam kolaborasi akademik. Penelitian ini juga menyarankan implikasi praktis bagi institusi pendidikan tinggi yang ingin meningkatkan kemampuan penelitian kolaboratif mereka serta memberikan arahan untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang terus berkembang ini.

Kata Kunci: Bantuan langung Tunai (BLT), Desa, Efektifitas

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang pemerintahannya didirikan berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, tujuan nasional utama dari pedoman ini adalah untuk menegakkan hak-hak rakyat. Indikator yang menunjukkan stabilnya

jumlah penduduk suatu negara adalah stabilnya jumlah penduduk yang mencakup tingkat keadilan, kesejahteraan, dan kesejahteraan masyarakat tertentu. Kualitas material tidak hanya menjadi indikator kesehatan suatu bangsa, namun juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah (Trifena, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, penyelenggaraan tangga rumah dan tujuan utama bidang pemerintahan adalah pembangunan dan kemasyarakatan, yang merupakan kemampuan yang dimiliki Desa. Kemudian diubah namanya menjadi Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan pemerintah desa, yang selanjutnya disebut kepala desa oleh perangkat desa, adalah penyelenggara pemerintahan desa yang merangkum urusan pemerintah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam sistem kesejahteraan nasional, media sosial merupakan sektor kunci yang didasari oleh gagasan bahwa suatu negara harus mampu berbisnis dan memastikan adanya jaring pendaatan bagi warganya yang tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Fenomena kemiskinan terjadi di seluruh dunia; Artinya, ini merupakan masalah yang harus diatasi dan menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Terlihat dari istilah “kemiskinan” bahwa seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, masyarakat tersebut menjalani kehidupan yang tidak menentu dan tidak tega dalam memenuhi



kebutuhan sehari-hari (Lesawengan dkk, 2020).

Dana Desa dapat digunakan sebagai alat hemat biaya yang dapat digunakan terus menerus untuk membandingkan rumah tangga dan rumah desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditransfer ke desa setelah ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, seperti pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), terdapat sekitar 25,67 juta orang miskin di Indonesia pada tahun 2018 dan 24,79 juta orang miskin pada tahun 2019, dengan persentase penurunan sebesar 0,44 persen. Namun kebangkitan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26,42 juta jiwa jika masih ada sanak saudara yang masih hidup. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,71%. Jika persentase kemiskinan yang ada di Indonesia agak tidak menentu, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan angka kemiskinan di Indonesia cukup serius dan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menggalakkan kemiskinan sebagai inisiatif pembangunan nasional

Pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin sebagai dampak dari kenaikan harga minyak

dunia pada tahun 2004. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, pada tahun 2008 pemerintah kembali melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti pada tahun 2005. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Iping, 2020)

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jusuf Kalla juga menekankan pentingnya program jaminan sosial. Strategi ini merupakan langkah penanggulangan kemiskinan. Prinsip pertama adalah memperbaiki dan memperkuat sistem jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin. Sistem jaminan sosial dirancang untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kecelakaan, ketegangan hubungan, kesulitan terkait pekerjaan, bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem jaminan sosial yang efektif akan menjamin individu atau masyarakat yang mengalami guncangan bahkan tidak mencapai tingkat kemiskinan.

Tinjauan Teoritis

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)

Pemerintah telah melaksanakan beberapa program jaminan sosial, menurut Buku Saku Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) (2020:1), untuk melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang merupakan kumpulan dana yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya pada masa krisis.



pandemi COVID-19. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja merupakan beberapa layanan sosial yang belum dapat diakses oleh masyarakat miskin dan rentan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan sumbangan uang kepada masyarakat miskin di daerah yang berasal dari Dana Desa untuk mengurangi pandemi COVID-19. Nilai BLTDana Desa sebesar Rp 600.000 per bulan untuk setiap warga miskin yang memenuhi persyaratan dan diberikan selama tiga (tiga) bulan, dan Rp 300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini merupakan pajak. Apabila kebutuhan desa lebih besar dari jumlah maksimal yang dapat ditampung oleh desa, kepala desa dapat meminta agar alokasi Dana Desa diperluas kepada Bantuan Langsung Tunai/Wali Kota. Penggunaan ini harus sesuai dengan dalil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam hal alokasi penambahan.

Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 sangat merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang secara makro menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Pemerintah telah menerapkan beberapa langkah baru untuk memerangi penyebaran dan kebangkitan kembali virus ini. Hal pertama yang ditentukan oleh :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengaturan Mata Uang Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Epidem

Penyakit Virus Corona (COVID- 19) dan/atau Dalam Kisaran Ancaman yang Mendukung Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan merupakan Undang- Undang

- b. Selain itu, pemerintah mendukung Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka melindungi masyarakat miskin, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang meliputi pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa).
- c. Di antara beberapa kebijakan yang telah ditetapkan dalam proses pelaksanaan BLT- Dana Desa ini adalah Petunjuk Penanganan COVID-19 Penanggulangan di Desa Via Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana tertuang dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020
- d. Peraturan Menteri Keuangan No.40 Tahun 2020 tentang Atas Peraturan Menteri Keuangan No.205 Tahun 2019 tentang Dana Desa

2. Evaluasi Program

Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart dalam Winarno (2016:165), evaluasi adalah suatu langkah dalam proses pelaksanaan program. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui penyebab kegagalan suatu program atau untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai rencana. Oleh



karena itu, evaluasi mempunyai tanggung jawab untuk menentukan akibat-akibat yang timbul dari suatu kegiatan tertentu dengan menggambarkan dampak-dampak dan menghitung berhasil tidaknya suatu program berdasarkan standar-standar atau kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kemudian Umar (2002:40) standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002 : 40), yaitu;

a. Utility (manfaat)

Hasil evaluasi berguna bagi pengelola untuk menyusun suatu keputusan terhadap suatu program yang sedang berjalan. Hasil evaluasi jika dikaitkan dengan bantuan langsung tunai (BLT) adalah untuk mengetahui sejauh mana BLT bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, karena pemerintah Indonesia meyakini BLT dapat meningkatkan perekonomian secara umum akibat pandemi Covid-19. -19 pandemi.

b. Accuracy (Akurat)

Informasi mengenai hasil evaluasi memiliki tingkat yang sangat tinggi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui keandalan data dan kehandalan data masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT). Jika terdapat risiko tinggi konflik dengan bantuan, maka masyarakat yang paling mungkin terwakili dalam daftar penerima langsung bantuan tunai (BLT) akan berisiko.

c. Feasibility (Layak)

Proses evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan

secara lugas. Hasil dari evaluasi ini jika

dikaitkan dengan bantuan langsung tunai (BLT) adalah memahami keabsahan bantuan langsung tunai dan keabsahan daftar penerima bantuan langsung tunai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan atau berdasarkan langsung lewat pendataan untuk memvalidasi data yang sudah diserahkan oleh pengumpul data.

Menurut Rossi dan Freeman dalam Wibawa (2017:63), evaluasi program harus mampu menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi, yang meliputi desain dan konseptualisasi program, pelaksanaan program (pemantauan dan akuntabilitas), dan penggunaan program (dampak dan efisiensi). Untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria yang relevan. Dengan kata lain, hal terpenting dalam membuat evaluasi adalah mencantumkan tujuan (goals) dan kriteria (kriteria). Tujuan mencakup pembelajaran yang sulit diterapkan dalam suatu program tertentu, baik yang dinyatakan secara global maupun dalam angka tertentu. Namun, kriteria tersebut memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan dievaluasi secara komprehensif.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”, dan sejahtera mempunyai arti yang berasal dari kata Sansekerta “Catera” yang berarti payung. Berdasarkan kalimat di atas, yang dimaksud dengan “Catera” (payung) adalah seseorang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kegelapan, dan ketakutan, sehingga



kehidupannya dapat dikatakan nyaman dan tenram, baik sejak lahir. atau tidak. Kesejahteraan merupakan beberapa kesimpulan yang diambil seseorang dari hasil konsumsi pemasukan yang dilakukan. Namun tingkat kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif karena besarnya kepuasan yang dihasilkan dari konsumsi pemasukan tersebut. Sunarti Bagi (2012)

Bagi masyarakat umum, kesejahteraan merupakan tanda bahwa mereka telah sampai pada keadaan sejahtera. Pengertiannya sendiri adalah suatu kondisi manusia dimana manusia berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan tenteram; Oleh karena itu, untuk mencapai keadaan tersebut masyarakat harus mempunyai usaha yang sesuai dengan kemampuannya. Pakar ekonomi mengkaji keadaan sebagai indikator aliran pendapatan individu dan pembelian kekuasaan masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

4. Evaluasi

Menurut Ndraha (2015), evaluasi adalah proses membandingkan standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Dapat dikombinasikan dengan penilaian, pemeringkatan, dan penilaian. Evaluasi didasarkan pada produk informasi mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai prestasi kerja. Beberapa kebutuhan, nilai, dan peluang telah tersedia melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan wawasan tentang

klarifikasi dan kritik terhadap tujuan dan sasaran, serta wawasan tentang penggunaan metode analisis lain, seperti pemecahan masalah dan rekomendasi. . Meskipun sejalan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih sejalan dengan pekerjaan dan kebijakan, khususnya ketika menyangkut implementasi publik. Evaluasi juga memiliki pendekatan- pendekatan,diantara nya : a) Evaluasi semu; b) Evaluasi Formal; c) Evaluasi Keputusan Teoritis. Dan evaluasi juga dengan tekniknya ada empat Teknik Evaluasi antaranya: a) Evaluasi Kompearatif; b) Evaluasi Historikal; c) Evaluasi Laboratorium; d) Evaluasi (Ed Hock. Zaini, 2015) mengatakan jika dilihat dari pespektif siklus kebijakan. Evaluasi biasanya dianggap sebagai sebuah proses aktivitas yang biasanya menyoroti apa yang terjadi setelah sebuah kebijakan public tertentu dilaksanakan atau diimplementasikan atau ditransformasikan kedalam berbagai bentuk kegiatan rutin birokrasi.

Metode

Dalam penelitian ini dengan judul “Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai (blt) di Desa bahitom, kabupaten Murung Raya ” menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini berupa untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya dengan menggunakan indikator atau pengukuran efektivitas dari Sutrisno yaitu 1) Pemahaman program, 2) Tepat Waktu, 3) Tepat Sasaran, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata .

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini



yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah penggunaan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti secara sistematis serta pengamatan secara cermat terhadap fenomena-fenomena yang ada sesuai dengan temuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menilai pelaksanaan program BLT di Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

2. Angket

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang sudah terjawab dan berkaitan dengan penilaian pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya

3. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, temuan penelitian, foto atau ilustrasi, buku, laporan, laporan, keuangan, undang-undang, hasil karya, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan diagram tersebut, kebijakan publik berfokus pada “publik dan permasalahannya”. Wacana publik berfokus pada bagaimana isu-isu ini dibahas, didefinisikan, dan bagaimana isu-isu tersebut dimasukkan ke dalam agenda. Menurut Suwitri (2008), kebijakan adalah suatu jenis tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Program tersebut di atas merupakan wujud upaya pemerintah menerapkan undang-undang khusus yang bertujuan untuk

membangkitkan semangat masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Opini masyarakat yang diungkapkan adalah opini kemiskinan. Agar suatu kebijakan tertentu dapat berhasil dalam suatu kolaborasi, maka harus ada efisiensi, yaitu suatu strategi. Menurut Harbani Pasolong (2012:51), efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan atau hasil kerja sama tim. Pencapaian Derajat menunjukkan keefektifan.

Pada bagian ini akan dibahas hasil kajian efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya dengan menggunakan teori Sutrisno yang dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

1. Pemahaman Program

Pemahaman Program adalah suatu jenis instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suwitri (2008), kebijakan adalah suatu jenis tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Program tersebut di atas merupakan wujud dari upaya pemerintah yang menerapkan undang-undang khusus yang



bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Opini publik yang diungkapkan adalah opini kemiskinan. Program apa pun yang dikembangkan juga dapat membantu suatu organisasi mencapai tujuannya. Program pemahaman ini merupakan suatu aspek dimana untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami dari kegiatan program tersebut. Dalam metode sosialisasi program BLT- Dana Desa yaitu pihak dari pemerintah desa Bahitom mengundang pihak dari Koordinator Daerah Kecamatan dan masyarakat desa Bahitom untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Sejauh ini berdasarkan hasil wawancara dari pihak aparat desa Bahitom, terkait dari pemahaman program ini, pihak dari aparat desa Bahitom sudah menyelenggarakan sosialisasi untuk program BLT-Dana Desa dan juga sejauh ini masyarakat yang menerima program BLT-Dana Desa tersebut sudah cukup memahami mekanisme penyaluran program BLT- Dana Desa yang mereka terima. Menurut peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dengan keterkaitannya indikator efektivitas yaitu pada pemahaman program tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ditujukan. Hal ini dilihat dari hasil tersebut bahwa masyarakat telah memahami mekanisme pada program BLT-Dana Desa yang dilakukan oleh aparat desa Bahitom itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Bahitom , Wawan warga RT 01 .

Menurutnya “ Bantuan langsung Tunai yang disalurkan oleh pemerintah Desa Bahitom sudah sesuai mekanisme penyaluran bantuan , hal ini dapat dilihat dari disiplin nya warga saat

2. Tepat Sasaran

Salah satu komponen penting dari proses perencanaan strategis untuk organisasi adalah sasaran. Tindakan-tindakan dan alokasi daya organisasi merupakan highlight utama dari sasaran ini. Tindakan dan alokasi daya organisasi menjadi fokus utama kajian ini. Tujuan dari indikator tepat sasaran ini adalah untuk menunjukkan bagaimana pemerintah atau organisasi mengaktualisasikan sasaran yang tidak tercermin dalam program yang dijalankan. Apabila suatu program tersebut dapat terealisasikan dengan baik, yaitu dengan adanya tepat sasaran dikatakan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya apabila tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terpenuhi oleh sasaran yang dilaksanakan oleh pemerintah atau organisasi tersebut, maka program tersebut dikatakan tidak berjalan sesuai prosedur dan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. indikator keberhasilan. Pada penelitian ini Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bahitom, bisa dikatakan masih belum tepat sasaran . Hal ini dikarenakan belum di update nya data ke pusat sehingga yang terima setiap tahun adalah data yang terdahulu , bisa dibilang dikatakan tidak tepat sasaran dikarenakan orang yang sudah meninggal masih terdata penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ani . Menurutnya

“ Program BLT yang di adakan pemerintah Desa Bahitom masih belum tepat sasaran , hal



ini dikarenakan banyak data yang belum diupdate , terutama data warga yang sudah meninggal beberapa tahun lalu , sekarang nama nya masih tercantum dalam penerima bantuan langsung tunai “ tutur nya

bantuan “ tutur salah satu aparat Desa Bahitom

3. Tepat Waktu

Program lain yang perlu diperhatikan manajemen waktu adalah Tercapainya. Ini berfungsi sebagai indikator seberapa baik tujuan tertentu akan tercapai. Indikator efektivitas adalah Ketepatan waktu adalah penggunaan waktu pada saat pelaksanaan program yang diperuntukkan bagi pihak yang menjalankan dan menjalankan program, misalnya suatu perintah atau organisasi. Oleh karena itu, hal ini membuat organisasi atau pemerintah tersebut di atas harus lebih berhati-hati dan berhati-hati dalam menjalankan atau menjalankan program tersebut. Oleh karena itu manajemen waktu sangat penting dalam setiap program yang dijalankan, agar program dapat berjalan sesuai rencana. Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan peneliti, pelaksanaan program BLT-Dana Desa Di Desa Bahitom Kecamatan Murung , Kabupaten Murung Raya dari segi ketepatan waktu dinilai kurang efektif. Hal ini berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan dengan bantuan Aparat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan warga aparat Desa

“untuk ketepatan waktu penerima bantuan langsung tunai di Desa Bahitom masih dinilai kurang efektif , dikarenakan masih banyak warga yang lambat datang untuk menerima

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan upaya menyeluruh untuk menentukan suatu sasaran yang harus dievaluasi sebagai suatu proses dalam suatu organisasi agar sasaran tersebut dapat berjalan secara efektif. Sebagai indikator efektivitas suatu program, poin mengenai tujuan yang dicapai ini dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa baik kinerja suatu program yang dijalankan oleh pemerintah atau organisasi. Deskripsi dari tujuan terukur dan lebih spesifik disajikan dalam teks. Dalam hal Penyaluran dan pendistribusian dari suatu program yang telah diluncurkan, apakah telah sesuai dengan prosedur dan sasaran yang telah ditentukan, dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan program tersebut. Berdasarkan pengamatan dan pengamatan peneliti, tujuan program di Desa Bahitom telah tercapai dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Toni , warga RT 03 Desa Bahitom .

“ Dalam penyaluran bantuan langsung tunai yang dilakukan pemerintah desa sudah bisa dikatakan tercapainya tujuan . Hal ini terlihat dari kepuasan masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai “

5. Perubahan Nyata

Indikator efektivitas yaitu perubahan nyata ini, merupakan suatu langkah untuk mengukur sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata



pada masyarakat setempat. Perubahan nyata menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat dampak dari sebuah program terhadap masyarakat. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Pada program BLT-Dana Desa dapat dilihat dari terwujudnya harapan adanya program BLT- Dana Desa ini untuk meminimalisir atau mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan menanggulangi kemiskinan dan juga untuk mengurangi beban terhadap perekonomian warga yang menerima BLT-Dana Desa tersebut dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan serta sosial ekonomi masyarakat khususnya di desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti, indikator efektivitas pada perubahan nyata yang dapat dilihat di Desa Bahitom itu dikatakan sudah sesuai. Menurut keluarga penerima bantuan, program BLT-Dana Desa telah berjalan dengan baik dan juga membantu mengurangi beban kebutuhan dari keluarga penerima bantuan program tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Dina , warga desa Bahitom RT 02 .

“ menurut saya , dengan adanya program bantuan langsung tunai yang diadakan pemerintah sudah sangat membantu banyak keluarga Bahitom , keluarga saya salah satunya ” tutur Dina.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada keluarga yang telah mensupport saya selama melakukan penelitian ini , terimakasih juga saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing saya yang sudah memberikan arahan serta masukan pada penelitian ini. Dan juga terimakasih kepada teman teman yang sudah ikut memberikan saran dan masukan selama penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Desa Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya sudah efektif . Hal ini dapat dilihat dari aspek Perubahan nyata yang dirasakan Masyarakat Desa Bahitom yaitu pada pemahaman program tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ditujukan.

Hal ini dilihat dari hasil tersebut bahwa masyarakat telah memahami mekanisme pada program BLT-Dana Desa yang dilakukan oleh aparat desa Bahitom itu sendiri. Dari Aspek Tepat Sasaran , program ini masih belum bisa dikatakan tepat sasaran dikarenakan banyak data masyarakat kurang mampu yang belum di update . Tepat waktu, pelaksanaan program BLT-Dana Desa Di Desa Bahitom Kecamatan Murung , Kabupaten Murung Raya dari segi ketepatan waktu dinilai kurang efektif. Hal ini berdasarkan temuan penelitian yang



dilakukan dengan bantuan Aparat.

Tercapainya Tujuan , Dalam hal Penyaluran dan pendistribusian dari suatu program yang telah diluncurkan, apakah telah sesuai dengan prosedur dan sasaran yang telah ditentukan, dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan program tersebut. Berdasarkan pengamatan dan pengamatan peneliti, tujuan program di Desa Bahitom telah tercapai dengan baik.

Perubahan nyata Pada program BLT-Dana Desa dapat dilihat dari terwujudnya dari harapan adanya program BLT-Dana Desa ini untuk meminimalisir atau mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan menanggulangi kemiskinan dan juga untuk mengurangi beban terhadap perekonomian warga yang menerima BLT-Dana Desa tersebut dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta sosial ekonomi masyarakat khususnya didesa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti, indikator efektivitas pada perubahan nyata yang dapat dilihat di Desa Bahitom , Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya itu dikatakan sudah sesuai. Menurut keluarga penerima bantuan, program BLT-Dana Desa telah berjalan dengan baik dan mengurangi beban kebutuhan dari keluarga penerima bantuan program tersebut.

Daftar Pustaka

Anggraini, Trifena. (2020). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

(IPDN) Jatinangor, Sumedang). <http://eprints.ipdn.ac.id/6353/>

Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Azzahra, Aulia. (2009). Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai (SLT) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sumatera Utara

Bahri, H. (2019). Ciri-ciri dan komponen evaluasi program. Jakarta.

BPS. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. In Berita Resmi Statistik

Claudia, Vanesa. Tampi, Gustaf. Londa, Y, Very. (2019). Evaluasi program Pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan. Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Sam Ratulangi Manado

Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Gibson, James, L. 2011. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta : Penerbit Erlangga

Gie, The Liang .2006. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung

Lasewengan Lisbeth. 2020. Dampak Bantuan Pkh Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanae Kota Manado.

Hayati, M. (2012). Desain Pembelajaran Berbasis Karakter. Pekanbaru: AlMujtahadah Press.

Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 1(1), pp. 516-526.

Muryadi, A. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. Surakarta : FKIP PJKR UTP SKA

Maun, Carly. (2020). Efektivitas Bantuan



Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaliat Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado.

Suryani, A. E. (2010). Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai di kelurahan kampung baru kecamatan medan utrara. Kota medan : Universitas Sumatra Utara

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Sutrisno, Edy. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Makassar : Kencana

Wahab. 2004. Analisis Kebijakan Dari formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Samarinda : Bumi Aksara

Winarto, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS

Widianingsih, R. (2017). Evaluasi program bantuan langsung tunai (BLT) di kecamatan prembun, kabupaten kebumen, jawa tengah : Universitas Santana Dharma, Yogyakarta

